



**LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
SEMESTER II TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



Jakarta Kota Maju, Lestari, dan
Berbudaya Yang Warganya Terlibat
Dalam Mewujudkan Keberadaban,
Keadilan, dan Kesejahteraan Bagi
Semua

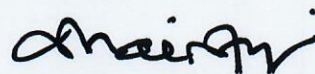
KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta 5 (Lima) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi dan UPT Kopri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 Februari 2019
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



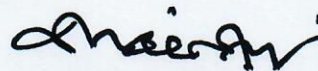
Chaidir, M. Si
NIP 196608181990031008

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 (Lima) Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri Tahun 2018 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berjalan sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Februari 2019
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Chaldir, M. Si
NIP 196608181990031008

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Gabungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 167.384.087.305,- meningkat Rp 39.100.440.435,- dibandingkan belanja pada Tahun 2017 sebesar Rp 128.283.646.873,-. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 terdapat kenaikan premi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada PT Taspen dibandingkan dengan tahun 2017 dan pada UPT Korpri terdapat beberapa kegiatan baru yang dilaksanakan tahun 2018 seperti Pelaksanaan MTQ ASN Tingkat Nasional dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) bagi Anggota ASN.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Nilai Aset Konsolidasi per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.161.842.240,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 524.016.899,-, Aset Tetap sebesar Rp 4.144.476.496,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 493.078.845,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 5.161.842.240,-. Nilai RK PPKD sebesar Rp 167.784.803.961,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan. Jumlah beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 159.900.506.361,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (159.900.506.361,-). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan Kegiatan Non-Operasional.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal Gabungan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp (2.719.538.353),- ditambah Perubahan Ekuitas sebesar Rp 7.881.380.593,-. Sehingga Ekuitas Entitas Konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 5.161.842.240,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis AkruaI.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 31 DES 2018	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	B.1	-	-	-
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	B.2.1	148.545.532.000	139.269.594.365	93,76
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	30.084.238.175	25.666.838.165	85,32
JUMLAH BELANJA OPERASI		178.629.770.175	164.936.432.530	92,33
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah		-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	2.545.058.486	2.333.474.775	91,69
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-
Belanja Aset Lainnya		114.840.000	114.180.000	99,43
JUMLAH BELANJA MODAL		2.659.898.486	2.447.654.775	92,02
JUMLAH BELANJA		181.289.668.661	167.384.087.305	92,33
SURPLUS/DEHSIT		(181.289.668.661)	(167.384.087.305)	92,33

II. N E R A C A

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA (GABUNGAN)

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		31-Des-18	31-Des-17
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Di Bendahara Pengeluaran		-	-
Piutang Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga		-	-
Beban Dibayar Dimuka		267.629	-
Persediaan		523.749.270	520.657.074
JUMLAH ASET LANCAR	C.1	524.016.899	520.657.074
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin		15.574.255.295	13.582.493.943
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		155.295.450	41.115.450
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		(11.585.963.549)	(10.376.144.224)
JUMLAH ASET TETAP	C.2	4.143.587.196	3.247.465.169
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		-	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	-
Aset Lain-Lain		1.901.171.834	1.264.080.141
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(1.408.092.989)	(772.250.896)
JUMLAH ASET LAINNYA	C.3	493.078.845	491.829.245
JUMLAH ASET		5.160.682.940	4.259.951.488
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
Utang Belanja		-	6.979.489.841
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	6.979.489.841
JUMLAH KEWAJIBAN	C.4	-	6.979.489.841
EKUITAS			
Ekuitas		(162.624.121.021)	(2.719.538.353)
RK PPKD		167.784.803.961	
JUMLAH EKUITAS	C.5	5.160.682.940	(2.719.538.353)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.160.682.940	4.259.951.488

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA (GABUNGAN) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DES 2018 DAN 31 DES 2017

URAIAN	CATATAN	31-Des-18	31-Des-17
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		-	-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	D.1	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah - LO		-	-
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	132.290.104.524	118.432.580.994
Beban Persediaan	D.3	4.461.517.560	2.115.697.591
Beban Barang	D.4	7.545.454.170	2.845.451.750
Beban Jasa	D.5	13.455.590.569	8.644.403.059
Beban Pemeliharaan	D.6	226.315.701	192.021.220
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.919.608.681	1.638.243.421
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		159.898.591.205	133.868.398.035
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS /DEFSIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga - LO		-	-
SURPLUS/DEFSIT - LO		(159.898.591.205)	(133.868.398.035)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DES 2018 DAN 31 DES 2017

URAIAN	CATATAN	31-Des-18	31-Des-17
Ekuitas - LO		(2.719.538.353)	2.097.319.560
RK PPKD		-	-
JUMLAH EKUITAS AWAL		(2.719.538.353)	2.097.319.560
Surplus/Defisit - LO		(159.898.591.205)	(133.868.398.035)
Mutasi RK PPKD		167.784.803.961	129.051.842.123
Koreksi Ekuitas		(5.991.463)	(302.001)
JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS		7.880.221.293	(4.816.857.913)
Ekuitas - LO		(162.624.121.021)	(131.771.380.476)
RK PPKD		167.784.803.961	129.051.842.123
JUMLAH EKUITAS AKHIR		5.160.682.940	(2.719.538.353)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten pemerintah.

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 256 Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi BKD;

c. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan serta pendayagunaan pegawai;

d. Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai;

e. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai;

f. Bidang Pengendalian Pegawai

Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pegawai;

g. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

h. Unit Pelaksana Teknis

Melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi BKD.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BKD.

Sejak 1 Januari 2016 Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi tidak lagi merupakan unit Kerja BKD pada Kabupaten Administrasi. Ketentuan pencabutan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pasal 74 huruf b.

Sejak 1 Januari 2017, nomenklatur Kantor Kepegawaian Kota berubah menjadi Suku Badan Kepegawaian Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Sejak 1 Januari 2017, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Korpri dan berkedudukan dibawah Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan harga pembelian.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

d. Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan.

Pertama, pos – pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI KEUANGAN

B.1. Pendapatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

B.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja Gabungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 167.384.087.305,- atau 92.33% dari Anggaran sebesar Rp 181.289.668.661,-

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Gabungan BKD Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Kantor Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 139.269.594.365,- atau mencapai 93.76% dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 148.545.532.000,-

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam Tabel berikut:

Belanja Pegawai

KODE REKENING	BELANJA PEGAWAI	PAGU ANGGARAN	REALISASI							TOTAL REALISASI	SISA ANGGARAN	%
			BKD	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI			
5.1.1.01.03.001	GAJI POKOK	13.064.002.000	12.490.623.200	-	-	-	-	-	-	12.490.623.200	573.378.800	95,61
5.1.1.01.03.002	TUNJ. KELUARGA	1.184.367.000	1.120.365.108	-	-	-	-	-	-	1.120.365.108	64.001.892	94,60
5.1.1.01.03.003	TUNJ. JABATAN	569.258.000	536.850.000	-	-	-	-	-	-	536.850.000	32.408.000	94,31
5.1.1.01.03.005	TUNJ. FUNGSIONAL	166.553.000	142.148.000	-	-	-	-	-	-	142.148.000	24.405.000	85,35
5.1.1.01.03.006	TUNJ. UMUM	565.454.000	540.060.000	-	-	-	-	-	-	540.060.000	25.394.000	95,51
5.1.1.01.03.008	TUNJ. KHUSUS (PPh)	11.129.452.000	10.736.256.923	-	-	-	-	-	-	10.736.256.923	393.195.077	96,47
5.1.1.01.03.009	TUNJ. BERAS	791.948.000	634.037.100	-	-	-	-	-	-	634.037.100	157.910.900	80,06
5.1.1.01.03.010	PEMBULATAN GAJI	196.000	160.612	-	-	-	-	-	-	160.612	35.388	81,94
5.1.1.01.03.016	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN	39.232.909.000	34.121.194.386	-	-	-	-	-	-	34.121.194.386	5.111.714.614	86,97
5.1.1.02.05.002	TUNJANGAN KINERJA DAERAH	79.011.493.000	76.228.924.036	-	-	-	-	-	-	76.228.924.036	2.782.568.964	96,48
5.1.1.10.01	TUNJ. TRANSPORT PEJABAT	2.829.900.000	2.718.975.000	-	-	-	-	-	-	2.718.975.000	110.925.000	96,08
TOTAL		148.545.532.000	139.269.594.365	-	-	-	-	-	-	139.269.594.365	9.275.937.635	93,76

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri sampai dengan bulan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar 85.32% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018

SKPD/UKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	9.594.309.972	8.449.102.188	88,06
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	271.030.291	252.390.150	93,12
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	214.862.181	201.550.454	93,80
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	221.908.218	199.838.671	90,05
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	319.564.236	290.549.950	90,92
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	355.821.689	345.423.507	97,08
UPT KORPRI	19.106.741.588	15.927.983.245	83,36
JUMLAH	30.084.238.175	25.666.838.165	85,32

B.2.3. Belanja Modal

Hingga 31 Desember 2018, terdapat realisasi belanja modal sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018

SKPD/UKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	2.248.467.851	2.052.204.280	91,27
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	32.670.000	32.070.000	98,16
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	2.908.325	2.908.235	100,00
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	0,00
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	74.423.360	63.589.900	85,44
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	0,00
UPT KORPRI	301.429.040	296.882.360	98,49
JUMLAH	2.659.898.576	2.447.654.775	92,02

Dari Rp 2.659.898.486,- yang dianggarkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan Kantor Kepegawaian Kota untuk Belanja Modal, Rp 2.447.654.775,- atau 92.02% yang terealisasi hingga 31 Desember 2018.

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

a. Kas

Rincian saldo kas konsolidasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

REKAPITULASI KAS (KONSOLIDASI)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
ASET								
ASET LANCAR								
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Uang Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Titipan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya meliputi:

- Seluruh kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota Administrasi.
- Seluruh kas yang merupakan sisa uang muka kerja yang masih berada di bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota Administrasi yang belum dipertanggungjawabkan/disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.
- Seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.-.

b. Beban Dibayar Dimuka

Pada tahun 2018 terdapat sisa saldo Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 267.629,- yang diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka pada Neraca. Nilai ini akan

dipakai untuk pembelian BBM Kendaraan Dinas Operasional pada tahun 2019.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

URAIAN REKENING	JUMLAH
Persediaan	523.749.270
Badan Kepegawaian Daerah	416.548.848
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat	2.332.000
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Utara	20.073.371
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat	39.517.690
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Selatan	12.596.980
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Timur	1.085.123
UPT KORPRI	31.595.258

Posisi persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 523.749.270,- merupakan sisa persediaan Alat Tulis Kantor. Persediaan ini dinilai dengan menggunakan harga perolehan yang berada di gudang persediaan BKD Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Kepegawaian Kota Administrasi.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2018 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 Badan Kepegawaian Daerah, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota adalah sebagai berikut:

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
ASET TETAP	10.560.343.878	507.704.500	360.618.728	1.030.128.929	499.596.900	629.028.804	2.142.129.006	15.729.550.745
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	10.560.343.878	507.704.500	360.618.728	1.030.128.929	499.596.900	587.913.354	2.027.949.006	15.574.255.295
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	41.115.450	114.180.000	155.295.450
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.556.217.698)	(438.752.800)	(340.987.340)	(994.333.169)	(427.794.180)	(525.164.512)	(1.302.713.850)	(11.585.963.549)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.556.217.698)	(438.752.800)	(340.987.340)	(994.333.169)	(427.794.180)	(525.164.512)	(1.279.877.850)	(11.563.127.549)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	(22.836.000)	(22.836.000)
	3.004.126.180	68.951.700	19.631.388	35.795.760	71.802.720	103.864.292	839.415.156	4.143.587.196

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan pertama kali yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

C.3. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) Mempunyai aset rusak berat senilai Rp 1.901.171.834,- sebagai berikut :

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	BKD KONSOLIDASI
ASET LAINNYA	1.704.423.502	42.398.600	102.382.500	51.967.232	1.901.171.834
Aset Tetap - Rusak Berat	1.704.423.502	42.398.600	102.382.500	51.967.232	1.901.171.834
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.228.799.457)	(25.760.000)	(102.382.500)	(51.151.032)	(1.408.092.989)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Rusak Berat	(1.228.799.457)	(25.760.000)	(102.382.500)	(51.151.032)	(1.408.092.989)
TOTAL ASET LAINNYA	475.624.045	16.638.600	-	816.200	493.078.845

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 6.979.489.841,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	Utang Gaji/Tunjangan Pegawai	-	888.000
2	Utang Iuran JKK-JKM	-	879.324.822
3	Utang Selisih Perubahan Premi JKK-JKM	-	6.099.277.019
TOTAL UTANG		-	6.979.489.841

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki hutang pada tahun 2018 dan seluruh hutang tahun 2017 telah dibayarkan pada tahun 2018.

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian, yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Penyajian akun Ekuitas sejak tahun 2015 berbeda dengan penyajian di tahun-tahun sebelumnya, dimana sebelumnya Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Perubahan ini dikarenakan mulai tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggunakan basis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 di Neraca Konsolidasi sebesar Rp 5.161.842.240,- adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN REKENING	31-Des-18
EKUITAS	5.160.682.940
Badan Kepegawaian Daerah	3.896.566.702
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Pusat	71.283.700
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Utara	39.704.759
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat	91.952.050
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Selatan	84.399.700
Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Timur	105.765.615
UPT KORPRI	871.010.414

D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

D.1. Pendapatan LO

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri tidak memiliki anggaran Pendapatan LO pada Tahun 2018.

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
PENDAPATAN - LO	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN								
BEBAN OPERASI								
Beban Pegawai	132.290.104.524	-	-	-	-	-	-	132.290.104.524
Beban Persediaan	738.233.938	80.713.600	49.528.168	43.449.256	61.741.300	58.657.284	3.429.194.014	4.461.517.560
Beban Barang	1.504.222.410	83.038.500	69.596.000	108.584.260	138.486.000	167.039.500	5.474.487.500	7.545.454.170
Beban Jasa	6.168.336.500	56.754.000	67.634.000	50.700.000	84.015.000	95.390.000	6.932.761.069	13.455.590.569
Beban Pemeliharaan	48.906.000	34.485.000	15.433.000	6.839.000	12.367.000	24.185.500	84.100.201	226.315.701
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.511.039.558	55.242.700	23.817.991	30.655.157	34.285.680	33.569.321	230.998.274	1.919.608.681
TOTAL BEBAN OPERASI	142.260.842.930	310.233.800	226.009.159	240.227.673	330.894.980	378.841.605	16.151.541.058	159.898.591.205
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(142.260.842.930)	(310.233.800)	(226.009.159)	(240.227.673)	(330.894.980)	(378.841.605)	(16.151.541.058)	(159.898.591.205)

D.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 132.290.104.542,-, terjadi peningkatan sebesar Rp 13.857.523.530,- atau sebesar 11.7% dari tahun 2017. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2018 Rp 4.461.517.560,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang

Jumlah Beban Barang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.545.454.170,-. Beban Barang adalah konsumsi atas barang-barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 13.455.590.569,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.6. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 226.315.701,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 desember 2018 sebesar Rp 1.921.523.837,-. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari aset tetap dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, perubahan ekuitas, ekuitas akhir.

URAIAN REKENING	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBAN JAKPUS	SUBAN JAKUT	SUBAN JAKBAR	SUBAN JAKSEL	SUBAN JAKTIM	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
EKUITAS AWAL								
Ekuitas - LO	(3.834.460.847)	97.067.150	61.255.229	132.539.006	61.154.830	139.918.512	622.987.767	(2.719.538.353)
RK PPKD	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS AWAL	(3.834.460.847)	97.067.150	61.255.229	132.539.006	61.154.830	139.918.512	622.987.767	(2.719.538.353)
PERUBAHAN EKUITAS								
Surplus/Defisit LO	(142.260.842.930)	(310.233.800)	(226.009.159)	(240.227.673)	(330.894.980)	(378.841.605)	(16.151.541.058)	(159.898.591.205)
Mutasi RK PPKD	149.995.317.489	284.460.150	204.458.689	199.838.671	354.139.850	345.423.507	16.401.165.605	167.784.803.961
Koreksi Ekuitas	(3.447.010)	(1.009.800)	-	(197.954)	-	(734.799)	(601.900)	(5.991.463)
JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS	7.731.027.549	(26.783.450)	(21.550.470)	(40.586.956)	23.244.870	(34.152.897)	249.022.647	7.880.221.293
EKUITAS AKHIR								
Ekuitas - LO	(146.098.750.787)	(213.176.450)	(164.753.930)	(107.886.621)	(269.740.150)	(239.657.892)	(15.530.155.191)	(162.624.121.021)
RK PPKD	149.995.317.489	284.460.150	204.458.689	199.838.671	354.139.850	345.423.507	16.401.165.605	167.784.803.961
JUMLAH EKUITAS AKHIR	3.896.566.702	71.283.700	39.704.759	91.952.050	84.399.700	105.765.615	871.010.414	5.160.682.940

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar Rp (2.719.538.353),-.

E.2. Surplus / (Defisit) LO

Nilai (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp (159.898.591.205),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non-operasional. dan pos luar biasa.

E.3. Mutasi RK PPKD

Nilai Mutasi RK PPKD pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 167.784.803.961,-.

E.4. Koreksi Ekuitas

Nilai Koreksi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp (5.991.463),-.

E.5. Ekuitas akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.160.682.940,-.

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah satu buah rekening di Bank DKI Kantor Cabang Utama Balaikota dengan Nomor Rekening 108.02.01433.7 atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL JUKOR MANAJEMEN TAHAP I (MASA AUDIT)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
PER 31 DESEMBER 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah dilakukan pembahasan Jurnal Koreksi Manajemen Tahap I data Laporan Keuangan dengan hasil sebagai berikut:

**NERACA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
PER 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	NERACA UNAUDITED	JUKOR MANAJEMEN TAHAP I		NERACA SETELAH JUKOR MANAJEMEN TAHAP I
		DEBIT	KREDIT	
ASET				
Aset Lancar	524.016.899			524.016.899
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas dan Setara Kas BLUD	-	-	-	-
Piutang	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	267.629	-	-	267.629
Persediaan	523.749.270	-	-	523.749.270
Aset Tetap	4.141.672.040	1.915.156		4.143.587.196
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	15.574.255.295	-	-	15.574.255.295
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	155.295.450	-	-	155.295.450
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.565.042.705	1.915.156	-	11.563.127.549
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.836.000	-	-	22.836.000
DANA CADANGAN				
Aset Lainnya	493.078.845			493.078.845
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Aset Lain-lain	1.901.171.834	-	-	1.901.171.834
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.408.092.989	-	-	1.408.092.989
R/K SKPD	-	-	-	-
JUMLAH ASET	5.158.767.784			5.160.682.940
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
Utang Belanja SKPD	-	-	-	-
Utang Belanja BLUD	-	-	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Jangka Panjang di BLUD	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
EKUITAS	162.626.036.177	-	1.915.156	162.624.121.021
RK PPKD	167.784.803.961	-	-	167.784.803.961
JUMLAH EKUITAS	5.158.767.784			5.160.682.940
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.158.767.784			5.160.682.940

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018

URAIAN	LPE UNAUDITED	JUKOR MANAJEMEN TAHAP I		LPE SETELAH JUKOR MANAJEMEN TAHAP I
		DEBIT	KREDIT	
Ekuitas - LO	2.719.538.353	-	-	2.719.538.353
RK PPKD	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS AWAL	2.719.538.353			2.719.538.353
Surplus/Defisit LO	159.900.506.361	-	1.915.156	159.898.591.205
Mutasi RK PPKD	167.784.803.961	-	-	167.784.803.961
Koreksi Ekuitas	5.991.463	-	-	5.991.463
JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS	7.878.306.137			7.880.221.293
Ekuitas - LO	162.620.036.177	-	1.915.156	162.624.121.021
RK PPKD	167.784.803.961	-	-	167.784.803.961
JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.156.767.784			5.160.682.940

LAPORAN OPERASIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018

URAIAN	LO UNAUDITED	JUKOR MANAJEMEN TAHAP I		LO SETELAH JUKOR MANAJEMEN TAHAP I
		DEBIT	KREDIT	
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-			-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-			-
BEBAN				
Beban Pegawai	132.290.104.524	-	-	132.290.104.524
Beban Persediaan	4.461.517.560	-	-	4.461.517.560
Beban Barang	7.545.454.170	-	-	7.545.454.170
Beban Jasa	13.455.590.569	-	-	13.455.590.569
Beban Pemeliharaan	226.315.701	-	-	226.315.701
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.921.523.837	-	1.915.156	1.919.608.681
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	159.900.506.361			159.898.591.205
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	-			-
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
SURPLUS/ DEFISIT - LO	159.900.506.361			159.898.591.205

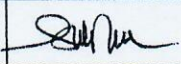
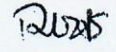
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	LRA UNAUDITED	JUKOR MANAJEMEN TAHAP I		LRA SETELAH JUKOR MANAJEMEN TAHAP I
		DEBIT	KREDIT	
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan	-	-	-	-
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-			-
JUMLAH PENDAPATAN	-			-
BELANJA				
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	139.269.594.365	-	-	139.269.594.365
Belanja Barang dan Jasa	25.666.838.165	-	-	25.666.838.165
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsel	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	164.936.432.530			164.936.432.530
Belanja Modal				
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	2.333.474.775	-	-	2.333.474.775
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	114.180.000	-	-	114.180.000
Jumlah Belanja Modal	2.447.654.775			2.447.654.775
JUMLAH BELANJA	167.384.087.305			167.384.087.305
Penerimaan Pembiayaan				
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-			-
Pengeluaran Pembiayaan				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-			-
PEMBIAYAAN NETTO	-			-
SURPLUS / (DEFISIT)	- 167.384.087.305			- 167.384.087.305

Saldo tersebut di atas adalah Laporan Keuangan Setelah Koreksi Manajemen Tahap I (Masa Audit) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN) per 31 Desember 2018.

Catatan:

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK PENANDA TANGAN	NAMA NIP	TANDA TANGAN
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	NIP.	
PPK SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)	K. Sulistyawati NIP. 196203271984092001	
Pelaksana Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta	Rizki Kurniadi NIP. 198907012011011003	
BPKD Provinsi DKI Jakarta	Mulyadini Arti NIP. 198901242011012014	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Telp. 3822263 Fax.3813523
JAKARTA

Kode Pos: 10111

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL REVIU NERACA, LPE, LO DAN LRA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BADAN PENGELOLA ASET DAERAH, DAN TIM KONSOLIDASI LK SKPD PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN TIM REVIU INSPEKTORAT

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Maret 2016 telah dilakukan pembahasan hasil reviu Neraca, LPE, LO DAN LRA Tahun 2016 antara
Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pengelola LK SKPD Provinsi DKI Jakarta dengan Tim Reviu
Inspektorat dan hasil sebagai berikut:

NERACA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
(GABUNGAN)
per - 31 Desember 2016

KODE REKESING	URAIAN	Saldo Per 31 Desember 2016 Sebelum Review	Saldo Per 31 Desember 2016 Setelah Review	Selisih	Keterangan
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.01	Kas				
1.1.01.01	Kas Daerah				
1.1.01.01.01	Selera Kas				
1.1.01.01.02	Potongan PFK				
1.1.01.01.03	PPH 21 di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.001	PPH 21 di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.002	PPH 22 di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.003	PPH 23 di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.004	PPH 26 di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.005	PPH Pasal 4 ayat (2) di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.006	PPN di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.007	Taperum yang belum disetor				
1.1.01.01.03.008	Iuran Wajib Pegawai yang belum disetor				
1.1.01.01.03.009	BPJS Kesehatan di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.010	BPJS Ketenagakerjaan di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.03.011	PFK lainnya di PKPD yang belum disetor				
1.1.01.01.04	Kas Transitoris				
1.1.01.01.05	Kas yang Dibatasi Penggunaannya				
1.1.01.01.06	Kas dari Jaminan Bank Garansi				
1.1.01.02	Kas di Bandahara Berjaminan				
1.1.01.02.01	Pendapatan yang Belum Disetor				
1.1.01.03	Kas di Bandahara Berjaminan				
1.1.01.03.01	Sisa Uang Persediaan				
1.1.01.03.01.001	Sisa Belanja UPI/GU				
1.1.01.03.01.001.01	Kas Tunai				
1.1.01.03.01.001.02	Kas di Bank				
1.1.01.03.01.001.03	Uang Panjar				
1.1.01.03.01.002	Sisa Belanja LS				
1.1.01.03.01.003	Sisa Belanja TU				
1.1.01.03.01.003.01	Kas Tunai				
1.1.01.03.01.003.02	Kas di Bank				
1.1.01.03.01.003.03	Uang Panjar				
1.1.01.03.02	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor				
1.1.01.03.03	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor				
1.1.01.03.03.001	PPH 21 di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.002	PPH 22 di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.003	PPH 23 di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.004	PPH 26 di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.005	PPH Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.006	PPN di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.007	PPN-BM di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.008	BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.009	BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor				
1.1.01.03.03.010	PFK lainnya di SKPD yang belum disetor				
1.1.03.04	Uang Titipan				
1.1.01.03.05	Kas di Bandahara Pengeluaran Sekolah				
1.1.01.03.05.001	Kas Dana BOP				
1.1.01.03.05.001.01	Kas Tunai BOP				
1.1.01.03.05.001.02	Kas Bank BOP				
1.1.01.03.05.001.03	Jasa Giro Dana BOP yang Belum Disetor				
1.1.01.03.05.001.04	Potongan PFK Dana BOP yang Belum Disetor				
1.1.01.03.05.001.04.01	PPH 21 Dana BOP yang belum disetor				
1.1.01.03.05.001.04.02	PPH 22 Dana BOP yang belum disetor				
1.1.01.03.05.001.04.03	PPH 23 Dana BOP yang belum disetor				
1.1.01.03.05.001.04.04	PPH 26 Dana BOP yang belum disetor				
1.1.01.03.05.001.04.05	PPH Pasal 4 ayat (2) Dana BOP yang belum disetor				
1.1.01.03.05.001.04.06	PPN Dana BOP yang belum disetor				
1.1.01.03.05.001.04.07	PPN-BM Dana BOP yang belum disetor				
1.1.01.03.05.002	Kas Dana BOS				
1.1.01.03.05.002.01	Kas Tunai BOS				
1.1.01.03.05.002.02	Kas Bank BOS				
1.1.01.03.05.002.03	Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor				
1.1.01.03.05.002.04	Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor				
1.1.01.03.05.002.04.01	PPH 21 Dana BOS yang belum disetor				
1.1.01.03.05.002.04.02	PPH 22 Dana BOS yang belum disetor				
1.1.01.03.05.002.04.03	PPH 23 Dana BOS yang belum disetor				
1.1.01.03.05.002.04.04	PPH 26 Dana BOS yang belum disetor				
1.1.01.03.05.002.04.05	PPH Pasal 4 ayat (2) Dana BOS yang belum disetor				
1.1.01.03.05.002.04.06	PPN Dana BOS yang belum disetor				
1.1.01.03.05.002.04.07	PPN-BM Dana BOS yang belum disetor				
1.1.01.04	Kas dari Selera Kas BLUD				
1.1.01.04.01	Kas BLUD				
1.1.01.04.01.001	Kas Tunai				
1.1.01.04.01.002	Kas di Bank				
1.1.01.04.02	Kas Transitoris BLUD				
1.1.01.04.03	Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor				
1.1.01.04.03.001	PPH 21 di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.002	PPH 22 di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.003	PPH 23 di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.004	PPH 26 di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.005	PPH Pasal 4 ayat (2) di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.006	PPN di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.007	PPN-BM di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.008	BPJS Kesehatan di BLUD yang belum disetor				

1.1.01.04.03.009	BPJS Ketenagakerjaan di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.03.010	PFK lainnya di BLUD yang belum disetor				
1.1.01.04.04	Uang Muka Pasien RSUD/K				
1.1.01.04.05	Uang Tilipan				
1.1.01.04.07	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor				
1.1.02	Investasi Jangka Pendek				
1.1.02.01	Investasi dalam Saham				
1.1.02.02	Investasi dalam Obligasi				
1.1.02.03	Investasi Jangka Pendek Lainnya				
1.1.03	Piutang Pendapatan				
1.1.03.01	Piutang Pajak Daerah				
1.1.03.01.01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor				
1.1.03.01.02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
1.1.03.01.03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
1.1.03.01.04	Piutang Pajak Air Permukaan				
1.1.03.01.05	Piutang Pajak Rokok				
1.1.03.01.06	Piutang Pajak Hotel				
1.1.03.01.07	Piutang Pajak Restoran				
1.1.03.01.08	Piutang Pajak Hiburan				
1.1.03.01.09	Piutang Pajak Reklame				
1.1.03.01.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan				
1.1.03.01.11	Piutang Pajak Parkir				
1.1.03.01.12	Piutang Pajak Air Tanah				
1.1.03.01.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pe				
1.1.03.01.16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun				
1.1.03.01.17	Dit...				
1.1.03.02	Piutang Retribusi				
1.1.03.02.01	Piutang Retribusi Jasa Umum				
1.1.03.02.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha				
1.1.03.02.03	Piutang Retribusi Pertijinan Tertentu				
1.1.03.03	Piutang Hasil Pengolahan Kelembagaan Daerah yang				
1.1.03.03.01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada P				
1.1.03.03.01.001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada P				
1.1.03.03.01.002	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada P				
1.1.03.03.01.003	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada P				
1.1.03.03.01.004	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada P				
1.1.03.03.01.005	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada P				
1.1.03.03.02	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada P				
1.1.03.03.02.001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.002	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.003	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.004	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.005	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.006	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.007	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.008	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.009	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.010	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Gr				
1.1.03.03.02.011	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.012	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.013	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.014	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.015	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.016	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.017	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.018	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.02.019	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT				
1.1.03.03.03	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah				
1.1.03.03.03.001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Gr				
1.1.03.04	Piutang Usaha				
1.1.03.04.01	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak D				
1.1.03.04.01.001	Piutang Hasil Penjualan Tanah				
1.1.03.04.01.002	Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin				
1.1.03.04.01.003	Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan				
1.1.03.04.01.004	Piutang Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1.1.03.04.01.005	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya				
1.1.03.04.02	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya				
1.1.03.04.03	Piutang Jasa Giro				
1.1.03.04.03.001	Piutang Jasa Giro Kas Daerah				
1.1.03.04.03.002	Piutang Jasa Giro Pemegang Kas				
1.1.03.04.03.003	Piutang Jasa Giro Dana Cadangan				
1.1.03.04.03.004	Piutang Jasa Giro Kas Non Anggar				
1.1.03.04.04	Piutang Bunga Deposito				
1.1.03.04.04.001	Piutang Bunga Deposito Pada Bank				
1.1.03.04.04.002	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan				
1.1.03.04.05	Piutang Kerugian				
1.1.03.04.05.001	Piutang Kerugian Uang Daerah				
1.1.03.04.05.002	Piutang Kerugian Barang Daerah				
1.1.03.04.05.003	Piutang Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler				
1.1.03.04.05.003.01	Piutang Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler				
1.1.03.04.05.003.02	Piutang Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler				
1.1.03.04.05.003.03	Piutang Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler				
1.1.03.04.06	Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Ni				
1.1.03.04.07	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pek				
1.1.03.04.08	Piutang Sanksi Pajak				
1.1.03.04.09	Piutang Denda retribusi				
1.1.03.04.10	Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah				
1.1.03.04.11	Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda				
1.1.03.04.12	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
1.1.03.04.13	Piutang Pendapatan dari Pengembalian				
1.1.03.04.14	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelat				
1.1.03.04.15	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan				
1.1.03.04.16	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kelembagaan Daerah				
1.1.03.04.17	Piutang Zakat				
1.1.03.04.18	Piutang BLUD				
1.1.03.04.18.001	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD				
1.1.03.04.18.001.01	Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa				
1.1.03.04.18.001.02	Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jamin				
1.1.03.04.18.002	Piutang Hibah BLUD				
1.1.03.04.18.003	Piutang Hasil Kerjasama BLUD				
1.1.03.04.18.004	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah				
1.1.03.04.18.005	Piutang Pendapatan Operasional BLUD				
1.1.03.04.18.006	Dit...				

1.1.03.04.19.001	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga				
1.1.03.04.19.001.01	Piutang Rekomendasi HGB HPL				
1.1.03.04.19.001.02	Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana				
1.1.03.04.19.002	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
1.1.03.04.19.003	Piutang Klaim Asuransi Aset				
1.1.03.04.19.004	Piutang Biaya Administrasi Surat Keterangan Asal (SKA)				
1.1.03.04.19.005	Piutang Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jaminan				
1.1.03.04.19.006	Piutang Perjanjian Kerjasama Taman Marga Setwa R				
1.1.03.04.19.007	Piutang Sumbangan dari Parum Jasa Raharja				
1.1.03.04.19.008	Piutang Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca				
1.1.03.04.19.009	Piutang Pemakaian Rusun Sederhana Marunda				
1.1.03.04.19.010	Piutang Pemakaian Rusun Sederhana Kapuk				
1.1.03.04.19.011	Piutang Hasil Tagih				
1.1.03.04.19.011.01	Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks				
1.1.03.04.19.012	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasar				
1.1.03.04.19.013	Piutang Penerimaan Kontribusi BUMD, PT Patungan				
1.1.03.04.19.014	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)				
1.1.03.04.19.015	Piutang Pendapatan Lain-lain				
1.1.03.04.19.016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahu				
1.1.03.04.19.017	Piutang Denda Keterlambatan Hasil Pengolahan Keka				
1.1.03.04.19.018	Piutang Denda Keterlambatan atas pelimpahan saldo				
1.1.03.04.19.019	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran				
1.1.03.04.19.020	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas				
1.1.03.04.19.021	Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi				
1.1.03.04.19.022	Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga				
1.1.03.04.19.023	Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame				
1.1.03.04.19.024	Dst...				
1.1.03.05	Piutang Transfer Pemeliharaan Jalan dan Perumahan				
1.1.03.05.01	Piutang Bagi Hasil Pajak				
1.1.03.05.02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam				
1.1.03.05.03	Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)				
1.1.03.05.04	Piutang Dana Alokasi Khusus				
1.1.03.05.05	Dst...				
1.1.03.06	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				
1.1.03.06.01	Piutang Dana Otonomi Khusus				
1.1.03.06.02	Piutang Dana Kelistrikan				
1.1.03.06.03	Piutang Dana Penyesuaian				
1.1.03.06.04	Dst...				
1.1.03.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				
1.1.03.08	Piutang Bantuan Keuangan				
1.1.03.09	Piutang Hibah				
1.1.03.10	Piutang Dana Darurat				
1.1.03.11	Piutang Sumbangan				
1.1.03.12	Dst...				
1.1.04	Piutang Lainnya				
1.1.04.01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman jangka Panjang				
1.1.04.01.01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah				
1.1.04.01.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah				
1.1.04.01.03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Perusahaan				
1.1.04.01.04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Lainnya				
1.1.04.01.05	Dst...				
1.1.04.02	Uang Muka				
1.1.04.02.01	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD				
1.1.04.02.02	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD				
1.1.04.02.03	Dst...				
1.1.04.03	Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipinjam				
1.1.04.04	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada				
1.1.04.05	Piutang Tunjangan DPRD				
1.1.04.06	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengada				
1.1.04.07	Piutang Hubungan Istimewa Kewajiban Setor Surplus				
1.1.04.08	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Giclan Penjualan R				
1.1.05	Penyisihan Piutang				
1.1.05.01	Penyisihan Piutang Pendapatan Tak Tertentu				
1.1.05.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor				
1.1.05.01.01.001	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor				
1.1.05.01.01.002	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Berm				
1.1.05.01.01.003	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ber				
1.1.05.01.01.004	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan				
1.1.05.01.01.005	Penyisihan Piutang Pajak Rokok				
1.1.05.01.01.006	Penyisihan Piutang Pajak Hotel				
1.1.05.01.01.007	Penyisihan Piutang Pajak Restoran				
1.1.05.01.01.008	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan				
1.1.05.01.01.009	Penyisihan Piutang Pajak Reklame				
1.1.05.01.01.010	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan				
1.1.05.01.01.011	Penyisihan Piutang Pajak Parkir				
1.1.05.01.01.012	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah				
1.1.05.01.01.015	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesa				
1.1.05.01.01.016	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah d				
1.1.05.02	Penyisihan Piutang Retribusi				
1.1.05.01.02.001	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum				
1.1.05.01.02.002	Penyisihan Piutang retribusi Jasa Usaha				
1.1.05.01.02.003	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu				
1.1.05.03	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu				
1.1.05.01.03.001	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.001.01	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.001.02	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.001.03	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.001.04	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.001.05	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.01	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.02	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.03	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.04	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.05	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.06	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.07	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.08	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.09	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				

1.1.05.01.03.002.10	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.11	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.12	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.13	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.14	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.15	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.16	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.17	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.18	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.002.19	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.003.00	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.03.003.01	Penyisihan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Mo				
1.1.05.01.04.001.00	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah				
1.1.05.01.04.001.01	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah				
1.1.05.01.04.001.02	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Me				
1.1.05.01.04.001.03	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bany				
1.1.05.01.04.001.04	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan				
1.1.05.01.04.001.05	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya				
1.1.05.01.04.002.00	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya				
1.1.05.01.04.003.00	Penyisihan Piutang Jasa Giro				
1.1.05.01.04.003.01	Penyisihan Piutang Jasa Giro Kas Daerah				
1.1.05.01.04.003.02	Penyisihan Piutang Jasa Giro Pemegang Kas				
1.1.05.01.04.003.03	Penyisihan Piutang Jasa Giro Dana Cadangan				
1.1.05.01.04.003.04	Penyisihan Piutang Jasa Giro Kas Non Anggaran				
1.1.05.01.04.004.00	Penyisihan Piutang Bunga Deposito				
1.1.05.01.04.004.01	Penyisihan Piutang Bunga Deposito Pada Bank				
1.1.05.01.04.004.02	Penyisihan Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan				
1.1.05.01.04.005.00	Penyisihan Piutang Utang Daerah Hasil Pemeriksa				
1.1.05.01.04.005.01	Penyisihan Piutang Utang Daerah Hasil Pemeriksa				
1.1.05.01.04.005.02	Penyisihan Piutang Utang Daerah Hasil Pemeriksa				
1.1.05.01.04.005.03	Penyisihan Piutang Utang Daerah Hasil Pemeriksa				
1.1.05.01.04.006.00	Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan				
1.1.05.01.04.006.01	Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaku				
1.1.05.01.04.006.02	Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih				
1.1.05.01.04.006.03	Penyisihan Piutang Denda Retribusi				
1.1.05.01.04.006.04	Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah				
1.1.05.01.04.006.05	Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda				
1.1.05.01.04.006.06	Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas				
1.1.05.01.04.006.07	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian				
1.1.05.01.04.006.08	Penyisihan Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan				
1.1.05.01.04.006.09	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan				
1.1.05.01.04.006.10	Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan				
1.1.05.01.04.006.11	Penyisihan Piutang Zakat				
1.1.05.01.04.018.00	Penyisihan Piutang BLUD				
1.1.05.01.04.018.01	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD				
1.1.05.01.04.018.02	Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa				
1.1.05.01.04.018.03	Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan P				
1.1.05.01.04.018.04	Penyisihan Piutang Hibah BLUD				
1.1.05.01.04.018.05	Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD				
1.1.05.01.04.018.06	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang				
1.1.05.01.04.018.07	Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD				
1.1.05.01.04.018.08	Da...				
1.1.05.01.04.019.00	Penyisihan Piutang Sumbangan dan Bantuan Sosial				
1.1.05.01.04.019.01	Penyisihan Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga				
1.1.05.01.04.019.02	Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL				
1.1.05.01.04.019.03	Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun				
1.1.05.01.04.019.04	Penyisihan Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
1.1.05.01.04.019.05	Penyisihan Piutang Klaim Asuransi Aset				
1.1.05.01.04.019.06	Penyisihan Piutang Biaya Administrasi Burel Keterangan				
1.1.05.01.04.019.07	Penyisihan Piutang Sumbangan Jaminan Keselamatan				
1.1.05.01.04.019.08	Penyisihan Piutang Perjanjian Kerjasama Taman Mak				
1.1.05.01.04.019.09	Penyisihan Piutang Sumbangan dari Perum Jasa Rah				
1.1.05.01.04.019.10	Penyisihan Piutang Penerimaan Pemakaian Rumah K				
1.1.05.01.04.019.11	Penyisihan Piutang Pemakaian Rusun Sederhana Ma				
1.1.05.01.04.019.12	Penyisihan Piutang Pemakaian Rusun Sederhana Ka				
1.1.05.01.04.019.13	Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan				
1.1.05.01.04.019.14	Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana				
1.1.05.01.04.019.15	Penyisihan Piutang Penerimaan Kontribusi BUMD, PT				
1.1.05.01.04.019.16	Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (I				
1.1.05.01.04.019.17	Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain				
1.1.05.01.04.019.18	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian B				
1.1.05.01.04.019.19	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan Hasil Peng				
1.1.05.01.04.019.20	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan atas pelimp				
1.1.05.01.04.019.21	Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Ko				
1.1.05.01.04.019.22	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi				
1.1.05.01.04.019.23	Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ke				
1.1.05.01.04.019.24	Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Rak				
1.1.05.01.04.019.25	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelangg				
1.1.05.01.05.001.00	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat				
1.1.05.01.05.001.01	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak				
1.1.05.01.05.001.02	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber D				
1.1.05.01.05.001.03	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)				
1.1.05.01.05.001.04	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus				
1.1.05.01.06.001.00	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat				
1.1.05.01.06.001.01	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus				
1.1.05.01.06.001.02	Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan				
1.1.05.01.06.001.03	Penyisihan Piutang Dana Penyesuaian				
1.1.05.01.07.001.00	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lain				
1.1.05.01.08.001.00	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan				
1.1.05.01.09.001.00	Penyisihan Piutang Hibah				
1.1.05.01.10.001.00	Penyisihan Piutang Dana Darurat				
1.1.05.01.11.001.00	Penyisihan Piutang Sumbangan				
1.1.05.01.12.001.00	Da...				
1.1.05.02.001.00	Penyisihan Piutang Lainnya				

1.1.05.02.01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman				
1.1.05.02.01.001	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada				
1.1.05.02.01.002	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada				
1.1.05.02.01.003	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada				
1.1.05.02.01.004	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Lainnya				
1.1.05.02.02	Penyisihan Uang Muka Kerja				
1.1.05.02.02.001	Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa				
1.1.05.02.02.002	Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa				
1.1.05.02.03	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Kekayaan Daerah				
1.1.05.02.04	Penyisihan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran				
1.1.05.02.05	Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD				
1.1.05.02.06	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan				
1.1.06	Beban Dibayar Dimuka				
1.1.06.01	Beban Pegawai Dibayar Dimuka				
1.1.06.02	Beban Barang Dibayar Dimuka				
1.1.06.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka				
1.1.06.04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka				
1.1.06.05	Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka				
1.1.06.06	Dst...				
1.1.07	Persediaan				
1.1.07.01	Persediaan Bahan Pakai Habis				
1.1.07.02	Persediaan Bahan/Material				
1.1.07.03	Persediaan Barang Lainnya				
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Rekening				
1.2.01.01.01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara				
1.2.01.01.02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah				
1.2.01.01.03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta				
1.2.01.03	Investasi dalam Proyek Pembangunan				
1.2.01.02	Investasi dalam Obligasi				
1.2.01.04	Dana Bergulir				
1.2.01.04.01	Dana Bergulir				
1.2.01.04.02	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih				
1.2.01.05	Deposito Jangka Panjang				
1.2.01.06	Investasi Non Permanen Lainnya				
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen				
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
1.2.02.01.01	Penyertaan Modal kepada BUMN				
1.2.02.01.02	Penyertaan Modal kepada BUMD				
1.2.02.01.02.001	Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah				
1.2.02.01.02.001.01	Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya				
1.2.02.01.02.001.02	Penyertaan Modal kepada PD Dharma Jaya				
1.2.02.01.02.001.03	Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana				
1.2.02.01.02.001.04	Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya				
1.2.02.01.02.001.05	Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya				
1.2.02.01.02.002	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan				
1.2.02.01.02.002.01	Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya				
1.2.02.01.02.002.02	Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang				
1.2.02.01.02.002.03	Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate				
1.2.02.01.02.002.04	Penyertaan Modal kepada PT Delta Jakarta Tbk				
1.2.02.01.02.002.05	Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ar				
1.2.02.01.02.002.06	Penyertaan Modal kepada PT Relax Amada				
1.2.02.01.02.002.07	Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara				
1.2.02.01.02.002.08	Penyertaan Modal kepada PT Cemari Toka				
1.2.02.01.02.002.09	Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International				
1.2.02.01.02.002.10	Penyertaan Modal kepada PT Grahasahuri Suryalaya				
1.2.02.01.02.002.11	Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askr				
1.2.02.01.02.002.12	Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Properti				
1.2.02.01.02.002.13	Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta				
1.2.02.01.02.002.14	Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Ex				
1.2.02.01.02.002.15	Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourindo				
1.2.02.01.02.002.16	Penyertaan Modal kepada PT Rumah Sakti Hal				
1.2.02.01.02.002.17	Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jak				
1.2.02.01.02.002.18	Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta				
1.2.02.01.02.002.19	Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah				
1.2.02.01.02.002.20	Dst...				
1.3	ASET TETAP				
1.3.01	Tanah				
1.3.02	Peralatan dan Mesin				
1.3.03	Gedung dan Bangunan				
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
1.3.05	Aset Tetap Lainnya				
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
1.3.07	Akumulasi Penyusutan				
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
1.4	DANA CADANGAN				
1.5	ASET LAINNYA				
1.5.01	Tagihan Pinjaman Angsuran				
1.5.01.01.01	Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah				
1.5.01.01.02	Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan				
1.5.01.02	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
1.5.01.03	Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Le				
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
1.5.02.01	Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan				
1.5.02.02	Aset Kerjasama Operasi (KSO)				
1.5.02.03	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate				
1.5.02.04	Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Transfer				
1.5.02.05	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkan				
1.5.02.06	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketu				
1.5.02.05.03	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna				

1.5.02.05.04	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Sera				
1.5.02.05.02	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang D				
1.5.02.05.05	Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang D				
1.5.02.06	Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya				
1.5.02.07	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga				
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud				
1.5.03.02	Goodwill				
1.5.03.03	Hak Cipta				
1.5.03.04	Patent				
1.5.03.05	Aset Tidak Berwujud Lainnya				
1.5.03.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
1.5.03.06.01	Akumulasi Amortisasi Goodwill				
1.5.03.06.02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan franchise				
1.5.03.06.03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta				
1.5.03.06.04	Akumulasi Amortisasi Patent				
1.5.03.06.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya				
1.5.04.01	Aset Lain-lain	493,078,845.00	493,078,845.00		
1.5.04.01	Aset Tetap - Rusak Berat	1,001,121,934.00	1,001,121,934.00		
1.5.04.02	Aset Tetap - Belum Validasi				
1.5.04.03	Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya				
1.5.04.04	Aset Tetap - Fesos Fasum				
1.5.04.05	Aset Lain-lain di BLUD				
1.5.04.06	Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan sta				
1.5.04.07	Aset di BP THR Lokasari				
1.5.04.08	Aset Lembaga di Biro Dokumentasi				
1.5.04.09	Kas Dikonsumsi				
1.5.04.11	Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya				
1.5.04.12	Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjarku				
1.5.04.13	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lusa B				
1.5.04.10	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1,408,092,989.00)	(1,408,092,989.00)		
1.5.04.10.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat	(1,408,092,989.00)	(1,408,092,989.00)		
1.5.04.10.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fesos Fasum				
1.5.04.10.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan				
1.5.04.10.05	Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan				
JUMLAH ASSET LAIN-LAIN		293,078,845.00	293,078,845.00		
1.1.08.01	RK SKPD Kas				
1.1.08.02	RK SKPD Non Kas				
JUMLAH ASSET		5,181,842,240.00	5,158,787,784.00	3,074,456.00	
2	KEWAJIBAN				
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)				
2.1.01.01	Utang Taspen				
2.1.01.01.01	Utang Taspen				
2.1.01.02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan				
2.1.01.02.01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS				
2.1.01.02.01.001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di PPKD				
2.1.01.02.01.002	Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di SPKD/BLUD				
2.1.01.02.02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS				
2.1.01.02.02.001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di PPKD				
2.1.01.02.02.002	Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di SPKD/BLUD				
2.1.01.03	Utang PPh Pusat				
2.1.01.03.01	Utang PPh 21				
2.1.01.03.01.001	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD				
2.1.01.03.01.002	Utang PPh 21 Dana BLUD				
2.1.01.03.02	Utang PPh 22				
2.1.01.03.02.001	Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD				
2.1.01.03.02.002	Utang PPh 22 Dana BLUD				
2.1.01.03.03	Utang PPh 23				
2.1.01.03.03.001	Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD				
2.1.01.03.03.002	Utang PPh 23 Dana BLUD				
2.1.01.03.04	Utang PPh 26				
2.1.01.03.04.001	Utang PPh 26 di SPKD dan PPKD				
2.1.01.03.04.002	Utang PPh 26 Dana BLUD				
2.1.01.03.05	Utang PPh Pasal 4 ayat (2)				
2.1.01.03.05.001	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD				
2.1.01.03.05.002	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD				
2.1.01.04	Utang PPN Pusat				
2.1.01.04.01	Utang PPN di SPKD dan PPKD				
2.1.01.04.02	Utang PPN Dana BLUD				
2.1.01.05	Utang Taperum				
2.1.01.05.01	Utang Taperum				
2.1.01.06	Utang Iuran Wajib Pegawai				
2.1.01.06.01	Utang Iuran Wajib Pegawai				
2.1.01.07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya				
2.1.01.07.01	Utang Asuransi				
2.1.01.07.01.001	Utang BPJS Kesehatan				
2.1.01.07.01.002	Utang BPJS Ketagakerjaan				
2.1.01.07.02	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-lain				
2.1.01.07.02.001	Utang PPK Lainnya				
2.1.01.08	Utang Jaminan				
2.1.01.08.01	Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame				
2.1.01.08.02	Utang Jaminan Penawaran				
2.1.01.08.03	Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan				
2.1.01.08.04	Utang Jaminan KTP Muslimin				
2.1.01.08.05	Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas				
2.1.01.08.06	Utang Jaminan Sanggah Banding				
2.1.02	Utang Bunga Pinjaman				
2.1.02.01	Utang Bunga Pinjaman				
2.1.02.01.01	Utang Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah				
2.1.02.01.02	Utang Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah				
2.1.02.01.03	Utang Bunga Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan				
2.1.02.01.04	Utang Bunga Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan				
2.1.03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
2.1.03.01	Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat				

2.1.03.01.01	Bagian Lancer Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFM)				
2.1.03.01.02	Bagian Lancer Utang - JICA SLA.... (Proyek MRT)				
2.1.03.02	Bagian Lancer Utang Kepada Pemerintah Daerah Lain				
2.1.03.03	Bagian Lancer Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan				
2.1.03.04	Bagian Lancer Utang Dalam Negeri Sektor Non Perbankan				
2.1.03.05	Bagian Lancer Utang Luar Negeri				
2.1.03.06	Bagian Lancer Utang Imbalan Pasca Kerja				
2.1.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah				
2.1.04.02	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah				
2.1.04.03	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
2.1.04.04	Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD				
2.1.04.04.001	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				
2.1.04.04.002	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Rakia				
2.1.04.04.003	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				
2.1.04.04.005	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum B				
2.1.04.04.0501	Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak				
2.1.04.04.05	Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat				
2.1.04.04.06	Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat				
2.1.04.04.07	Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito				
2.1.05.01	Utang Belanja				
2.1.05.01.01	Utang Belanja SKPD				
2.1.05.01.01	Utang Belanja Pegawai				
2.1.05.01.02	Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD				
2.1.05.01.02.001	Utang Belanja Persediaan				
2.1.05.01.02.002	Utang Belanja Barang				
2.1.05.01.02.003	Utang Belanja Jasa				
2.1.05.01.02.003.01	Utang Belanja Jasa Non TALI				
2.1.05.01.02.003.02	Utang Belanja TALI				
2.1.05.01.02.004	Utang Belanja Pemeliharaan				
2.1.05.01.02.005	Utang Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.05.01.02.006	Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien				
2.1.05.01.02.007	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pampor				
2.1.05.01.03	Utang Belanja Modal SKPD				
2.1.05.01.03.001	Utang Belanja Modal Tanah				
2.1.05.01.03.002	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2.1.05.01.03.003	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.1.05.01.03.004	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
2.1.05.01.03.005	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.1.05.02	Utang Belanja BLUD				
2.1.05.02.01	Utang Belanja Pegawai BLUD				
2.1.05.02.02	Utang Belanja Barang Jasa BLUD				
2.1.05.02.03	Utang Belanja Modal BLUD				
2.1.05.04	Utang Belanja Subsidi				
2.1.05.06	Utang Belanja Hibah				
2.1.05.07	Utang Belanja Bantuan Sosial				
2.1.05.08	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD				
2.1.06	Utang Jangka Pendek Lainnya				
2.1.06.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD				
2.1.06.01.01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak				
2.1.06.01.01.001	Utang Restitusi Pajak				
2.1.06.01.01.002	Utang Kompensasi Pajak				
2.1.06.02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer				
2.1.06.03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah				
2.1.06.04	Utang Transfer				
2.1.06.05	Utang Jangka Pendek Lainnya				
2.1.06.06	Utang Pajak PT Jakarta Tourindo				
2.1.06.07	Utang Restitusi Pajak				
2.1.06.08	Utang Hub. Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana B				
2.1.06.09	Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi				
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2.2.01	Utang Dikawatirkan				
2.2.01.01	Utang Kepada Pemerintah Daerah Lain				
2.2.01.01.01	IBRD SLA 1247 (Proyek JUFM/JEDI)				
2.2.01.01.02	JICA SLA.... (Proyek MRT)				
2.2.01.01.03	Proyek JEDI				
2.2.01.02	Utang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
2.2.01.03	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan				
2.2.01.04	Utang Dalam Negeri Sektor Non Perbankan				
2.2.01.05	Utang Dalam Negeri - Obligasi Daerah				
2.2.02	Utang Luar Negeri				
2.2.02.01	Utang Luar Negeri				
2.2.03	Utang Jangka Panjang Lainnya				
2.2.03.01.01	Utang Jangka Panjang Lainnya				
2.2.03.01.02	Utang Jangka Panjang di BLUD				
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
JUMLAH KEWAJIBAN					
3.1.01.01.01	EKUITAS AWAL	162,622,000,721	162,622,000,721	3,074,456	
3.1.03.01.01	RK PPKD Kas	167,484,087,305	167,484,087,305		
3.1.03.01.02	RK PPKD Non Kas	400,710,656	400,710,656		
JUMLAH EKUITAS		5,161,842,240.00	5,168,767,784.00	3,074,456.00	
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		5,161,842,240.00	5,168,767,784.00	3,074,456.00	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

KODE REKENING	URAIAN REKENING				
	EKUITAS AWAL				

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

KODE REKENING		URAIAN REKENING		2017	2018
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak				
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Pajak/Bumih/Baru Alam				
4.2.2	Dana Alokasi Umum				
4.2.3	Dana Alokasi Khusus				
4.3	Pendapatan Hibah				
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Dana Darurat				
4.3.4	Dana Penyesuaian				
Jumlah Pendapatan					
BELANJA					
5.1	Belanja Operasi				
5.1.1	Belanja Pegawai				
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.3	Belanja Bunga				
5.1.4	Belanja Subsidi				
5.1.5	Belanja Hibah				
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
5.2	Belanja Modal				
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga				
5.1.7.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Lainnya				
Jumlah Belanja					
SURPLUS / (DEFISIT)					
PEMBIAYAAN					
7.1	Pengelolaan Pembiayaan				
7.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya				
7.1.1.01	SILPA Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya				
7.1.1.01.01	Transfer SILPA antar BLUD				
7.1.1.01.02	Koreksi SILPA BLUD				
7.1.1.02	SILPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya				
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
7.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
7.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
7.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah				
7.2	Pengeluaran Pembiayaan				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
PEMBIAYAAN NETTO					
SILPA / (SIKPA)					
3.1.02.07	Selisih Kurs Belum Terealisasi				
SILPA / (SIKPA) SETELAH KOREKSI DAN PENYESUAIAN					
7.1.A	SILPA / (SIKPA) Dana BLUD				
7.1.A	SILPA / (SIKPA) Dana Subsidi				

KODE REKENING		URAIAN REKENING		2017	2018
	Saldo Anggaran Lebih Awal				
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan				
	Subtotal				
	Pendapatan				
	Belanja				
	Surplus / (Defisit)				
	Penerimaan Pembiayaan				
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Pembiayaan Netto				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				
	Subtotal				
	Selisih Kurs Belum Terealisasi				
	Saldo Anggaran Lebih Akhir				
	Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi				

KODE REKENING		URAIAN REKENING		2017	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Masuk :					
	Penerimaan Pajak Daerah				
	Penerimaan Retribusi daerah				
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah				
4A	Penerimaan Operasional BLUD				
4B	Penerimaan Deposit Pasien				
4C	Penerimaan UMK BLUD				
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak				
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
	Penerimaan Dana Alokasi Umum				
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus				
	Penerimaan Dana Penyesuaian				

	Penerimaan Hibah				
	Jumlah Arus Kas Masuk				
	Arus Kas Keluar :				
5E	Pembayaran Pegawai				
	Pembayaran Barang				
5A	Pengeluaran Operasional BLUD				
5B	Pengembalian Deposit Pasien				
5C	Pembayaran UMK BLUD				
5D	Penyetoran Penutupan BLUD				
	Pembayaran Bunga				
	Pembayaran Subsidi				
	Pembayaran Hibah				
	Pembayaran Bantuan Sosial				
	Pembayaran Bantuan Keuangan				
	Pembayaran Tak Terduga				
	Jumlah Arus Kas Keluar				
	JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI				
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	Arus Kas Masuk :				
	Penjualan atas Tanah				
	Penjualan atas Bangunan				
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai				
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan				
	Penjualan Aset Tetap Lainnya				
	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman				
	Jumlah Arus Kas Masuk				
	Arus Kas Keluar :				
	Pembentukan Dana Cadangan				
6A	Perolehan Tanah				
6B	Perolehan Peralatan dan Mesin				
6C	Perolehan Gedung dan Bangunan				
6D	Perolehan Jalan, Infrastuktur dan Jaringan				
6E	Perolehan Aset Tetap Lainnya				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen				
	Jumlah Arus Kas Keluar				
	JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	Arus Kas Masuk :				
	Setoran Saldo Kas di BLUD setelah pembubaran (Jasa Giro)				
	Jumlah Arus Kas Masuk				
	Arus Kas Keluar :				
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
	Kas BLUD ex UPT Transjakarta (TA 2017)				
	Jumlah Arus Kas Keluar				
	JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
	Arus Kas Masuk :				
	Penerimaan Utang Jaminan				
	Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun)				
	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Awal Tahun)				
	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Awal Tahun)				
	Kas yang dibatasi penggunaannya				
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
7A	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak				
7B	Penerimaan Non Pajak				
	Jumlah Arus Kas Masuk				
	Arus Kas Keluar :				
	Hasil Eksekusi atas Jaminan				
	Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)				
	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun)				
	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Akhir Tahun)				
	Penyetoran Kas yang dibatasi penggunaannya 2017				
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
8A	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak				
8B	Pengeluaran Non Pajak				
	Jumlah Arus Kas Keluar				
	JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
	KOREKSI SILPA				
9A	KOREKSI SETORAN SALDO AWAL KAS BLUD				
	Koreksi (Penurunan) Kas				
1.1.01.04	Saldo Awal Kas BLUD				
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah				
	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah				
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan				
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran				
	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD				
	Saldo Akhir Kas				

Demikian Berita acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019

Mengetahui,
BADAN KEPENGAWAHAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Mardiyanti
NIP. 196410151990032002
Nugroho Bayu, S
NIP.

TIM KONSOLIDASI BPKD
PROVINSI DKI JAKARTA

Mulyadini Arti
NIP. 198901242011012014

TIM BPAD
PROVINSI DKI JAKARTA

Ugan Diposentono
NIP. 19860301200401010

TIM RIVU
INSPEKTORAT PROVINSI
DKI JAKARTA

Yaya Mulyana
NIP. 197206131998031009
Rima Mulyanti Zain
NIP. 197408151994032007



INSPEKTORAT
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9
Telepon 021 - 3822263 Fax. 021 - 3813523
JAKARTA

Kode Pos : 10110

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL REVIEW NERACA LPE, LO DAN LRA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
DENGAN TIM REVIEW INSPEKTORAT DAN TIM REKONSILIASI BPKD DAN BPAD PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2018

Pada hari ini tanggal telah dilakukan review data Laporan Keuangan antara Entitas Akuntansi
Penggabung SKPD, BPKD Provinsi DKI Jakarta, BPAD Provinsi DKI Jakarta, dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan hasil sebagai berikut:

NERACA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
PER 31 DESEMBER 2018

URAIAN	NERACA UNREVIEW	JUKOR REVIEW		NERACA REVIEWED
		DEBIT	KREDIT	
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Penerimaan	524.016.899	-	-	524.016.899
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas dan Salara Kas BLUD	-	-	-	-
Piutang	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	267.629	-	-	267.629
Aset Tetap	523.749.270	-	-	523.749.270
Tanah	4.144.746.496	16.033.824	19.108.280	4.141.672.040
Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	15.593.363.575	-	19.108.280	15.574.255.295
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	155.295.450	-	-	155.295.450
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11.581.076.529)	16.033.824	-	(11.565.042.705)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(22.836.000)	-	-	-
DANA CADANGAN				
Aset Lainnya				
Tagihan Penjualan Angsuran	493.078.845	-	-	493.078.845
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.901.171.834	-	-	1.901.171.834
	(1.408.092.989)	-	-	(1.408.092.989)
R/K SKPD				
JUMLAH ASET	5.161.842.240			5.158.767.784
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
Utang Belanja SKPD	-	-	-	-
Utang Belanja BLUD	-	-	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Jangka Panjang di BLUD	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
EKUITAS				
RK PPKD	(162.622.961.721)	3.074.456	-	(162.626.036.177)
	167.784.803.961	-	-	167.784.803.961
JUMLAH EKUITAS	5.161.842.240			5.158.767.784
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.161.842.240			5.158.767.784

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	LPE UNREVIEW	JUKOR REVIEW		LPE REVIEWED
		DEBIT	KREDIT	
Ekuitas - LO RK PPKD	(2.719.538.353)	-	-	(2.719.538.353)
JUMLAH EKUITAS AWAL	(2.719.538.353)	-	-	(2.719.538.353)
Surplus/Defisit LO	(159.900.506.361)	-	-	(159.900.506.361)
Mutasi RK PPKD	167.784.803.961	-	-	167.784.803.961
Koreksi Ekuitas	(2.917.007)	3.074.456	-	(5.991.463)
JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS	7.881.380.593	-	-	7.878.306.137
Ekuitas - LO RK PPKD	(162.622.961.721)	3.074.456	-	(162.626.036.177)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.161.842.240	-	-	5.158.767.784

**LAPORAN OPERASIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	LO UNREVIEW	JUKOR REVIEW		LO REVIEWED
		DEBIT	KREDIT	
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
Dana Perimbangan - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum - LO	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus - LO	-	-	-	-
JUMLAH DANA PERIMBANGAN - LO	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
BEBAN				
Beban Pegawai	132.290.104.524	-	-	132.290.104.524
Beban Persediaan	4.461.517.560	-	-	4.461.517.560
Beban Barang	7.545.454.170	-	-	7.545.454.170
Beban Jasa	13.455.590.569	-	-	13.455.590.569
Beban Pemeliharaan	226.315.701	-	-	226.315.701
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.921.523.837	-	-	1.921.523.837
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	159.900.506.361	-	-	159.900.506.361
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
SURPLUS/ DEFISIT - LO	(159.900.506.361)	-	-	(159.900.506.361)

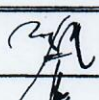
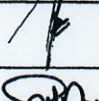
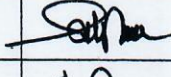
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018

URAIAN	LRA UNREVIEW	JUKOR REVIEW		LRA REVIEWED
		DEBIT	KREDIT	
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
BELANJA				
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	139.269.594.365	-	-	139.269.594.365
Belanja Barang dan Jasa	25.666.838.165	-	-	25.666.838.165
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	164.936.432.530			164.936.432.530
Belanja Modal				
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	2.333.474.775	-	-	2.333.474.775
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	114.180.000	-	-	114.180.000
Jumlah Belanja Modal	2.447.654.775			2.447.654.775
JUMLAH BELANJA	167.384.087.305			167.384.087.305
Penerimaan Pembiayaan				
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	(167.384.087.305)			(167.384.087.305)

Saldo tersebut di atas adalah Laporan Keuangan Setelah Review BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN) per 31 Desember 2018.

Catatan:

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK PENANDA TANGAN	NAMA NIP	TANDA TANGAN
Tim Review Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Yaya Mulyana NIP. 197206131998031009	
	Rima Mujiyanti Zein NIP. 197408151994032007	
PPK SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)	K. Sulistyawati NIP. 196203271984092001	
Pelaksana Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta	Ligan NIP. 198505012011011010	
BPKD Provinsi DKI Jakarta	Mulyadini Arti NIP. 198901242011012014	

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2018	%	REALISASI 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	8
	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah					
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Perimbangan					
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah					
4.3.1	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasi					
5.1.1	Belanja Pegawai		148.545.532.000,00	139.269.594.385,00	93,78	113.869.532.723,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		30.084.238.175,00	25.666.838.165,00	85,32	13.715.463.923,00
5.1.3	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi		178.629.770.175,00	164.936.432.550,00	92,33	127.584.996.646,00
	Belanja Modal					
5.2.1	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		2.545.058.486,00	2.333.474.775,00	91,69	698.650.227,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		114.840.000,00	114.180.000,00	99,43	0,00
	Jumlah Belanja Modal		2.545.058.486,00	2.447.654.775,00	92,02	698.650.227,00
	Belanja Tak Terduga					
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		181.289.668.661,00	167.384.087.305,00	92,33	128.283.646.873,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(181.289.668.661,00)	(167.384.087.305,00)	92,33	(128.283.646.873,00)
	7.1 Penerimaan Pembiayaan					
7.1.1	SILPA - Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2 Pengeluaran Pembiayaan					
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
	SILPA / (SIKPA)		(181.289.668.661,00)	(167.384.087.305,00)	92,33	(128.283.646.873,00)
	SILPA / (SIKPA) Dana BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00
	SILPA / (SIKPA) Dana Hibah		(167.384.087.305,00)	(167.384.087.305,00)	92,33	(128.283.646.873,00)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA,

Chaidir

CHAIDIR, M. SI
NIP 196608181990031008

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
DANA PERIMBANGAN - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
Beban Pegawai	132.290.104.524,00	118.432.580.994,00	13.857.523.530,00	11,70
Beban Persediaan	4.461.517.560,00	2.115.697.591,00	2.345.819.969,00	110,88
Beban Barang	7.545.454.170,00	2.845.451.750,00	4.700.002.420,00	165,18
Beban Jasa	13.455.590.569,00	8.644.403.059,00	4.811.187.510,00	55,86
Beban Pemeliharaan	226.315.701,00	192.021.220,00	34.294.481,00	17,86
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.921.523.837,00	1.638.243.421,00	283.280.416,00	17,29
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	159.900.506.361,00	133.868.398.035,00	26.032.108.326,00	19,45
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(159.900.506.361,00)	(133.868.398.035,00)	(26.032.108.326,00)	19,45
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(159.900.506.361,00)	(133.868.398.035,00)	(26.032.108.326,00)	19,45
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(159.900.506.361,00)	(133.868.398.035,00)	(26.032.108.326,00)	19,45

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA,

Chaidir
CHAIDIR, M. SI
NIP 196808181990031008

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2017 dan 2016		(131.771.380.476,00)	(610.252.840.256,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		129.051.842.123,00	612.350.159.816,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2018 dan 2017		(2.719.538.353,00)	2.097.319.560,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2017 dan 2016		129.051.842.123,00	612.350.159.816,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(129.051.842.123,00)	(612.350.159.816,00)
RK PPKD per 1 Januari 2018 dan 2017		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		(2.719.538.353,00)	2.097.319.560,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(159.900.506.361,00)	(133.868.398.035,00)
Mutasi RK PPKD		167.784.803.961,00	129.051.842.123,00
Koreksi Ekuitas		(2.917.007,00)	(302.001,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		7.881.380.593,00	(4.816.857.913,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(162.622.961.721,00)	(131.771.380.476,00)
RK PPKD		167.784.803.961,00	129.051.842.123,00
EKUITAS AKHIR		5.161.842.240,00	(2.719.538.353,00)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)

#

PROVINSI DKI JAKARTA, *k*

Chaidir

CHAIDIR, M. SI
NIP 196608181990031008

NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

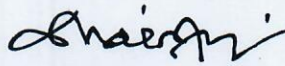
		(Dalam Rupiah)	
Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas			
Kas di Kas Daerah		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas dan Setara Kas BLUD		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang BLUD		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		267.629,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		267.629,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		0,00	0,00
Persediaan Bahan Pakai Habis		523.749.270,00	520.657.074,00
Persediaan Bahan/Material		436.053.593,00	505.431.777,00
Persediaan Barang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		87.695.677,00	15.225.297,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		524.016.899,00	520.657.074,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Dana Bergulir		0,00	0,00
Investasi Permanen		0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
ASET TETAP		0,00	0,00
Tanah			
Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Gedung dan Bangunan		15.593.363.575,00	13.582.493.943,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		155.295.450,00	41.115.450,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(11.603.912.529,00)	(10.376.144.224,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(11.581.076.529,00)	(10.376.144.224,00)
Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		(22.836.000,00)	0,00
DANA CADANGAN		4.144.746.496,00	3.247.465.169,00
ASET LAINNYA		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		0,00	0,00
Aset Tetap - Rusak Berat		1.901.171.834,00	1.264.080.141,00
Aset Tetap - Belum Validasi		1.901.171.834,00	1.264.080.141,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat		(1.408.092.989,00)	(772.250.896,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		(1.408.092.989,00)	(772.250.896,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
R/K SKPD		493.078.845,00	491.829.245,00
RK SKPD Kas		0,00	0,00
RK SKPD Non Kas		0,00	0,00
JUMLAH ASET		5.161.842.240,00	4.259.951.488,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017 (Audited)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Belanja		0,00	6.979.489.841,00
Utang Belanja SKPD		0,00	6.979.489.841,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	6.979.489.841,00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal SKPD		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	6.979.489.841,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Luar Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	6.979.489.841,00
EKUITAS - LO		(162.622.961.721,00)	(2.719.538.353,00)
RK PPKD		167.784.803.961,00	0,00
RK PPKD Kas		167.384.087.305,00	0,00
RK PPKD Non Kas		400.716.656,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		5.161.842.240,00	(2.719.538.353,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.161.842.240,00	4.259.951.488,00

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)
#- PROVINSI DKI JAKARTA, k



CHAIDIR, M. SI
NIP 196608181990031008